

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

NOMOR LAP-21/KPP.0608/2025

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Menteng Dua adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 254 / KMK.01/ 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Berikut profil KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sebelum dan sesudah reorganisasi :

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.01/2020, KPP Pratama memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

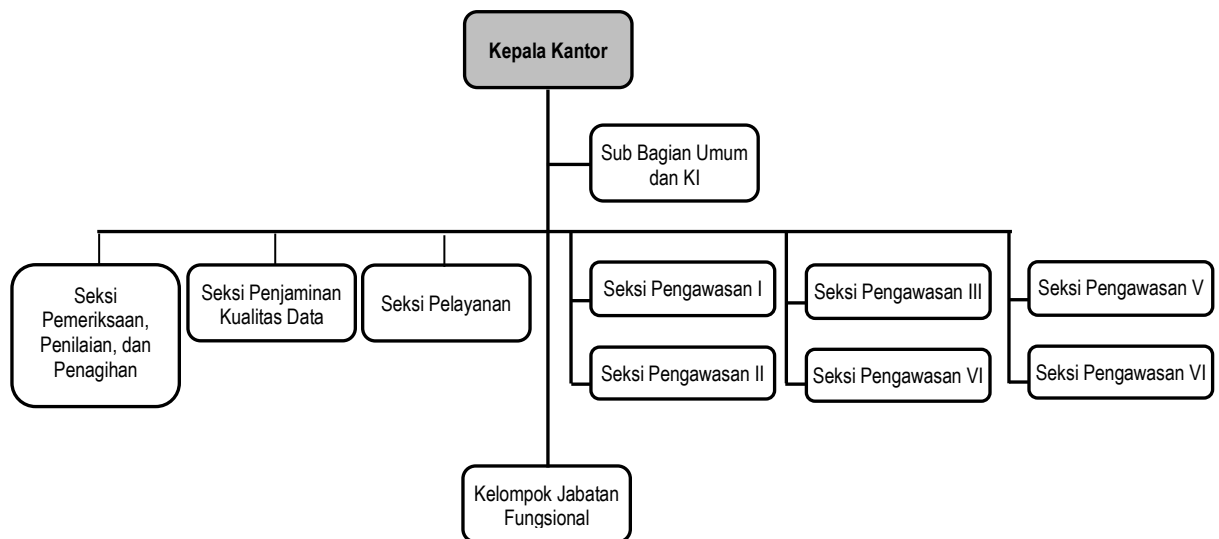
Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua menyelenggarakan fungsi :

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan permohonan pelayanan perpajakan /pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Menteng Dua setelah reorganisasi. Reorganisasi adalah sebagai berikut:



Gambar 1 : Struktur Organisasi Setelah SMO

B. Mandat Yang Diberikan Kepada KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, secara langsung mendapat mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun anggaran 2024, sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat nomor KEP-311/WPJ.06/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan pajak yang harus dicapai KPP Pratama Jakarta Menteng Dua adalah sebesar Rp 5.779.255.871.000.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua berusaha untuk menjadi instansi yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dengan mentaati kode etik yang

telah ditetapkan serta dapat mempertanggungjawabkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara transparan.

C. Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

Selain mempunyai peranan strategis sebagai pengemban penerimaan negara, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua juga melaksanakan peran strategis lainnya yaitu melakukan penyuluhan, edukasi, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Bendaharawan dan/ atau Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Jakarta Menteng Dua yang meliputi kelurahan Menteng, kelurahan Cikini, kelurahan Pegangsaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Rencana kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dilakukan dengan menggunakan metode *Balanced Score Card* (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrument perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran Strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran – ukuran strategis (Indikator Kinerja Utama/(IKU)) dan targetnya.

Balanced Score Card (BSC) yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua menerapkan empat perspektif, yaitu : *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Dari 4 (empat) perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 11 sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target						
				Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Stakeholder Perspective										
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
Customer Perspective										
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	<u>2a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%

		<u>2b-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	<u>3a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Internal Process Perspective										
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	<u>4a-CP</u>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
		<u>4b-N</u>	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<u>6b-N</u>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		<u>6c-N</u>	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	<u>7a-CP</u>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<u>7b-CP</u>	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
		<u>7c-N</u>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	10%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Learning & Growth Perspective										
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
		<u>9b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
		<u>9c-N</u>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	<u>11a-CP</u>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
----	-------------------------------------	---------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja Organisasi (IKU) KPP Pratama Jakarta Menteng Dua pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Tahun 2024

Berikut disampaikan perbandingan target awal dan realisasi pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Menteng Dua pada tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Utama	Target Awal Tahun	Realisasi Tahun 2024
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,89%
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	105,00
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,68%
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	101,48%
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	107,27%
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	118,75%
7.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	109,25%
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	120%
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	112,35%
10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,51%
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	115,51%
12.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120,00%
13.	Tingkat efektivitas penagihan	75%	120,00%

14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100,00%
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120,00%
16.	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,49
17.	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	113,12
18.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	110,65
19.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berikut disampaikan perbandingan pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dalam tiga tahun terakhir :

No	Indikator	2022		2023		2024	
	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	117,91%	100%	102,86%	100%	100,89%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	X	X	100%	80,20	100	105,00
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	108,88%	100%	119,74%	100%	100,68%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan	100%	80,27%	100%	85,32%	100%	101,48%

	penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	99,73%	100%	63,96%	100%	107,27%
Edukasi dan pelayanan yang efektif							
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	X	X	70%	120%	74%	118,75%
7	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	X	X	X	X	100%	109,25%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	98,37%	90%	103,41%	90%	120%
Pengujian kepatuhan material yang efektif							
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	117,86%	100%	120%	100%	112,35%
10	Persentase pemanfaatan	X	X	100%	119,18%	100%	119,51%

	data selain tahun berjalan						
11							
Penegakan hukum yang efektif							
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	X	X	80%	84,68%	100%	120,00%
13	Tingkat efektivitas penagihan	X	X	75%	104,73%	75%	120,00%
14	Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan	X	X	80%	95,12%	100%	100,00%
Data dan Informasi yang berkualitas							
15	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	X	X	100%	138,91%	100%	120,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
16	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	X	X	X	X	100	117,49
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93,96	85	96,87	85	113,12
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	X	X	X	X	90	110,65
Pengelolaan Keuangan yang optimal							

19	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	X	X	100	92,24	100	120
----	---	---	---	-----	-------	-----	-----

3. **Upaya yang Dilakukan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024**

Sebagai upaya untuk optimalisasi pencapaian penerimaan negara dan pencapaian target kinerja lainnya, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua melakukan beberapa strategi dan program kerja sebagai berikut :

1. Menerbitkan STP, SP2DK, dan LHP2DK
2. Membuat laporan capaian kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak,
3. Melakukan pengawasan pada Aplikasi Mandor
4. Melakukan pengawasan pembayaran Wajib Pajak untuk setiap masa/tahun pajak;
5. Menghimbau dan menerbitkan STP kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya;
6. Pembentukan Tim Satgas untuk monitoring dan evaluasi pemantauan SPT Tahunan;
7. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan;
8. Membuka Layanan di Luar Kantor (LDK), termasuk di kantor kelurahan dan perkantoran Wajib Pajak;
9. Membuka layanan loket pengisian SPT Tahunan di kantor pajak,
10. Melakukan pengawasan pada aplikasi Mandor
11. Melaksanakan kegiatan pojok pajak
12. Melakukan pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan menerbitkan SP2DK atas kewajiban pembayaran masa tahun berjalan yang belum disetorkan
13. Melakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 dan menerbitkan SP2DK apabila ditemukan indikasi kenaikan pembayaran PPh Pasal 25 tahun berjalan
14. Kegiatan edukasi dan Bimbingan teknis perpajakan kepada calon Wajib Pajak
15. Kegiatan Pajak Bertutur
16. Penerbitan artikel perpajakan

17. Pengusulkan Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan survei efektivitas penyuluhan dan pelayanan
18. Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei
19. Monitoring penyampaian Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dari Direktorat P2Humas dan/atau Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
20. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
21. Pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran
22. Pengumpulan data lapangan pada saat Visit Wajib Pajak Strategis
23. Penginputan pada aplikasi ALKET
24. Pelaksanaan program Assesment Center bagi pejabat eselon III dan IV
25. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan Jabatan Pelaksana umum tahun 2024
26. Pelaksanaan survei kepuasan Pelayanan Perpajakan baik untuk intern maupun eksten
27. Pengawasan terhadap pelaksanaan DKO dan Rencana MR melalui rapat
28. Pengalokasian DIPA tepat sasaran
29. Pengawasan terhadap revisi DIPA
30. Penyusunan rencana penarikan dana
31. Melaksanakan kegiatan efisiensi anggaran
32. Mendokumentasikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk tercapainya target kinerja tahun 2024.

4. **Analisis Kinerja Tahun 2024**

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini selain dilaporkan mengenai hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, juga dilakukan evaluasi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

a. **Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

Realisasi penerimaan negara pada tahun 2024 adalah sebesar 5.830.841.241.886 atau 100,89% dari target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan penerimaan bruto pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 38.97%.

Prognosa penerimaan sebesar Rp 5.340.066.808.000 dan terealisasi sebesar Rp5.830.841.241.886 atau mengalami deviasi positif sebesar 9,19%.

b. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan dan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah persentase jumlah total SPT yang disampaikan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib SPT.

Pada tahun 2024 persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Menteng Dua adalah sebanyak 12.866 jumlah SPT dari target SPT 14.790 atau sebesar 86.99% dari target 100%.

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai 100.68% dari target 100% atau sebesar Rp 5.627.070.289.988,00 dari target sebesar Rp 5.589.299.571.000,00.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak telah optimal, sementara tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak belum optimal sebagaimana yang diharapkan dan diharapkan akan meningkat di tahun berikutnya.

c. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan diperlukan adanya pengawasan yang optimal.

Pada tahun 2024 persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Jakarta Menteng Dua adalah sebesar 107.27% dari target 100% atau mencapai Rp 203.770.951.898,00 dari target sebesar Rp 189.956.300.000,00.

d. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Ada dua indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, yaitu persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang tercapai sebesar 87,88% dan Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 109,25% dari target 82.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di KPP dalam penyampaian pengetahuan perpajakan kepada stakeholder sudah baik.

e. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Penerbitan STP, Dinamisasi PPh Pasal 25, dan Penambahan Wajib Pajak.

Pada tahun 2024 telah diterbitkan STP dengan total 6.751 STP. Realisasi data perpajakan sebesar 120.00%. Realisasi penambahan Wajib Pajak secara kuantitatif sebesar 127.61% dan kualitatif sebesar 152.78%. Dinamisasi PPh 25 terealisasi sebesar 51.36%. Sehingga pada tahun 2024 persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif telah tercapai sebesar 108,07% dari target 90%.

f. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai sebesar 112,35%. Ada dua komponen dalam penentuan indikator ini yaitu pembuatan SP2DK dan capaian tindak lanjut berupa pembayaran dari Wajib Pajak.

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan Data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Sedangkan Data Matching yaitu Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Realisasi dari IKU persentase pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan tercapai 119,51% dari target 100%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi sebesar 115,51% dari target 100%.

g. Penegakan Hukum yang Efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Efektivitas dari kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian 120,00% dari target 100,00%.

Realisasi persentase efektivitas penagihan sebesar 108,99%. Efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu Variabel tindakan penagihan (50%), Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%) dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk kemudian dikirimkan ke Kantor Wilayah. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah telah terealisasi 100,00%.

h. Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Menteng Dua telah efektif dalam kegiatan penyediaan data yang akurat dan lengkap. Dibuktikan dengan persentase penyediaan data potensi perpajakan telah mencapai 120,00% dari target. Data potensi pajak yang akurat tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM. Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu pelaksanaan kegiatan kebidanan, kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebidanan dan kepatuhan pelaporan.

Pada tahun 2024, Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua tercapai sebesar 117,49% dari target 100%

Indeks Penilaian Integritas Organisasi dihitung dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Hasil penghitungan indeks dari survei terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua pada tahun 2024 tercapai 96,15 dari target 80,00.

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Manajemen risiko merupakan proses untuk mengelola risiko organisasi dengan unsur penilaian berupa administrasi, pelaporan dan realisasi rencana mitigasi risiko. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 tercapai 99,59 dari target 90,00.

j. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan untuk IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat tercapai 120 dari target 100.

5. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua terdiri dari 95 pegawai yang mencakup Kepala Kantor, Kepala Seksi, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penyuluh dan Pelaksana lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan
1	Sevta Winanda	197009171995031001	Kepala Kantor
2	Yudi Sudrajat	197506251996021001	Kepala Seksi
3	Abdul Munir Hasan	197009141997031001	Kepala Seksi
4	Suho`At	197903132001121003	Kepala Seksi
5	Iwan Rahmawan	197107291997031002	Kepala Seksi
6	Mohamad Surono	197309291994021001	Kepala Seksi
7	Maria Shinta Junita Hutahuruk	197206121992122001	Kepala Seksi
8	Muhiddin	197708052000031002	Kepala Seksi
9	Didik Daryanto	197309081995111001	Kepala Seksi
10	Hendra Hartawan	198401222009011008	Kepala Seksi
11	Agustina Sukma	196908121996032001	Kepala Subbag
12	Syarifaulhuda	199605312016122001	Pelaksana
13	Ade Haniyah	200003052019122003	Pelaksana
14	Rizkita Putri Marindra	200007062019122004	Pelaksana
15	Yopi Megitasari	199908072018122005	Pelaksana
16	Princecho Kautsar Aksana	199811272018011004	Pelaksana
17	Hafidz Naufal Syamaidzar	199707182018011004	Pelaksana
18	Satria Pradana Gofar	199709152016121005	Pelaksana
19	Muninggar Puspa Mahery	199703312016122001	Pelaksana
20	Ellena Asmara	199705122016122001	Pelaksana
21	Anugerah Tri Putranto	199311272013101002	Pelaksana
22	Aditya Pratama	200004162019121004	Pelaksana
23	Alfiana Fi Asmaillahil Husna	199912262019122001	Pelaksana
24	Rizki Arif Kurniawan	200008242019121002	Pelaksana
25	Sholihin	199902272018121002	Pelaksana
26	Pradewi Ryandari	199905162018122004	Pelaksana
27	Arifa Ristiana	199809242018012001	Pelaksana
28	Ulima Ruwaida	199604252018012002	Pelaksana
29	Hamdan Fauzi	199406122015021001	Pelaksana
30	Habib Mahdinugroho	199812032018011004	Pelaksana
31	Muhammad Najib Fayruz	199701012018011002	Pelaksana
32	Ilma Nasyrotul Farihah Alim	199610162018012003	Pelaksana
33	Mochammad Bayu Dirgantara	199807062019121001	Pelaksana
34	Sabila Nur Abdul Basith	199812052018121002	Pelaksana
35	Roy Alvaro Tarigan	199906192019121002	Pelaksana
36	Anisa Nur Fitriani	199901272018122004	Pelaksana
37	Amalia Damayanti	199806162018012002	Pelaksana
38	Farida Nur Anisa	199706062016122002	Pelaksana

39	Elizabeth Siahaan	198702252010122002	Account Representative
40	Eryc Navis Ekaputra	198501312010121004	Account Representative
41	Kodarusman	197701131999031002	Account Representative
42	Primawan Wisda Nugroho	198705072015021002	Account Representative
43	Mena Kuswery	198303012006022001	Account Representative
44	Suhadi	197611161998031001	Account Representative
45	Lukman Hakim	198704152009121002	Account Representative
46	Nuswantoro Asmoro Bangun	198403162003121002	Account Representative
47	Manganar Simon Petrus Manalu	197309221995021001	Account Representative
48	Guntur Wahyu Prasetyo	198207012009011014	Account Representative
49	Anang Zaini Nasukha	198404162003121003	Account Representative
50	Nurul Wahda Umar	198410022003122002	Account Representative
51	Laras Purwaningsih	199511202016122002	Account Representative
52	Merda Listana Leonyca	198508072010122006	Account Representative
53	Tedy Septian	199009272012101002	Account Representative
54	Candra Widyaningrum	198701242008122002	Account Representative
55	Depi Jaenudin	198007172000121002	Account Representative
56	Stephani Tiurosavino	199604112015022001	Account Representative
57	Ismi Febrianty	199002142014022006	Account Representative
58	Andini Mulatsari	198804102014022003	Account Representative
59	Imam Wahyudi	197906042000121003	Account Representative
60	Dimas Surya Putra	198611242008121004	Account Representative
61	Wawan Setiawan	198405052006021002	Account Representative
62	Rella Nurkasih	199204292015022006	Account Representative
63	Herman	198105012000121004	Account Representative
64	Muchammad Anggun Setiyawan	198310102003121002	Account Representative

65	Shinta Widhi Nugrahani	199301252013102001	Account Representative
66	Muchamad Fakhrudin	198311162002121003	Account Representative
67	Ali Imron	198505202004121001	Account Representative
68	Aulia Riski Wulandari	199212202014112001	Account Representative
69	Amalia Nurlina Larasati	199310112014112002	Account Representative
70	Budiman Sianturi	197306211998031002	Juru Sita
71	Muh. Ainur Rijal Al Karim	199802052019121001	Juru Sita
72	Lucky Timotius Pelealu	199803102018011002	Juru Sita
73	Sekar Indah Nur Wardani	199905312019122001	Bendaharawan
74	Winny Wahyuni Lestari	199812182018012001	Sekretaris
75	Toto Prasetyo	197212231992031001	Pemeriksa Pajak Madya
76	Yeni Setiyowati	198305312007012001	Penyuluh Pajak Ahli Muda
77	Muh. Ardani	197110191992011001	Penyuluh Pajak Ahli Muda
78	Sutjitro	197103161991031002	Pemeriksa Pajak Muda
79	Kusnadi	197308121994021003	Pemeriksa Pajak Penyelia
80	Reny Haerany	197108251992032003	Asisten Penyuluh Pajak Penyelia
81	Tono Sumartono	197701011996021003	Pemeriksa Pajak Penyelia
82	Adi Cahyo Setiyawan	197712042000121002	Pemeriksa Pajak Penyelia
83	Mega Imee Rose Manik	198410072003122002	Penyuluh Pajak Ahli Pertama
84	Yudho Dito Arsono	199201232015021002	Pemeriksa Pajak Pertama
85	Erly Setyowati Nugraheny	199203292014022002	Pemeriksa Pajak Pertama
86	Muhammad Mustakim	198405072004121001	Asisten Penyuluh Pajak Mahir
87	Deni Rumdani Syahlan	198807122009121001	Pemeriksa Pajak Pertama
88	Bima Adetya	198904012010121004	Pemeriksa Pajak Pertama
89	Putri Handayani	199001142014022004	Pemeriksa Pajak Pertama
90	Akhmad Fathoni	198810202014021005	Pemeriksa Pajak Pertama
91	Antoni Lubis	199208102014111005	Pemeriksa Pajak Pelaksana

92	Dany Nugroho	199203202014111004	Pemeriksa Pajak Pelaksana
93	Dwi Cahyo Feri Pamuji	199302182014111001	Pemeriksa Pajak Pelaksana
94	Giovanni William Clint Sutrisno	199210202014111004	Pemeriksa Pajak Pelaksana
95	Mohammad Iqbal Assegaf	199511202016121001	Pemeriksa Pajak Pelaksana

Sesuai dengan laporan Analisis Beban Kerja, jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan jumlah pegawai yang ada saat ini telah sesuai dengan beban kerja di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dan semuanya telah dipertimbangkan sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas.

6. Analisis Program Kerja Tahun 2024

a. Penerimaan Pajak yang Optimal

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua telah merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target penerimaan pajak. Secara umum, terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan, yaitu pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material Wajib Pajak. Selain itu, optimalisasi pengawasan Wajib Pajak juga dilakukan dengan melibatkan fungsional pemeriksa agar lebih komprehensif.

KPP Pratama Jakarta Menteng Dua juga mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan serta menerapkan tindakan penagihan yang efektif guna mempercepat pencairan tunggakan pajak.

b. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Berdasarkan capaian kinerja, realisasi persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2024 mencapai 101,48%, melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan. Selain itu, kegiatan seperti pojok pajak dan pengiriman surat imbauan kepada Wajib Pajak juga dilakukan guna mendorong pelaporan SPT Tahunan.

c. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah melebihi target dengan dilakukannya penambahan bahan baku Pemeriksaan Khusus dan

dilakukannya monitoring pembayaran SKP Wajib Pajak secara berkala sebelum 30 hari.

d. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Realisasi pencapaian dua Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini telah mencapai target, hal ini menunjukkan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan edukasi dan pelayanan yang efektif kepada Wajib Pajak telah dilaksanakan dengan baik.

Salah satu poin dalam perhitungan persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku Wajib Pajak setelah mengikuti kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Tercapainya indikator kinerja ini dari target yang ditetapkan menunjukkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun *daring*, kepada Wajib Pajak telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

e. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya pengawasan pembayaran masa telah dilakukan dengan optimal. Rencana kegiatan tersebut di antaranya adalah melakukan penerbitan STP kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, melakukan monitoring Dinamisasi PPh Pasal 25, dan melakukan tindak lanjut Matching Data Pemicu pada tahun berjalan. Pelaksanaan rencana kerja telah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan telah tercapainya target Indikator Kinerja Utama.

f. Pengawasan Kepatuhan material yang Efektif

Ada beberapa rencana kegiatan untuk dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dalam pencapaian pengawasan yang efektif, yaitu kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dimulai dengan penelitian dan analisis SPT Tahunan/Masa serta data pemicu, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

g. Penegakan Hukum yang Efektif

Pencapaian realisasi seluruh indikator kinerja terkait sasaran strategis penugasan hukum yang efektif menunjukkan bahwa program kerja yang direncanakan telah dilaksanakan secara baik dan efektif. Program kerja tersebut antara lain berupa penyelesaian tunggakan pemeriksaan sesuai waktu yang telah ditentukan, menghimbau dan melakukan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya, dan pengajuan usulan pencegahan kepada Wajib Pajak yang diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

h. Data dan Informasi yang berkualitas

Upaya untuk terciptanya data dan informasi yang berkualitas telah dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah dengan penginputan Alat keterangan serta adanya pengawasan terhadap pembuatan Alket pada Aplikasi Alket DJP dan pengawasan terhadap penerbitan Alat Keterangan.

Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap yang belum ada pada sistem.

i. SDM yang kompeten

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh SDM yang kompeten yaitu dengan mengadakan pelatihan, Transfer of Knowledge, Bimbingan Teknis, dan *In House Training*. Kegiatan *In House Training* dan Bimbingan Teknis telah dilaksanakan secara rutin dan ditujukan kepada pegawai yang memerlukan pelatihan.

j. Organisasi yang berkinerja tinggi

Upaya yang dilakukan untuk mencapai organisasi yang berkinerja tinggi adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DKO dan Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan dilaksanakannya rapat Dialog Kinerja Organisasi secara rutin setiap triwulan.

Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan addendum Piagam Mitigasi Risiko sebanyak 1 kali.

k. Pengelolaan anggaran yang berkualitas

Upaya yang dilakukan untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah membuat laporan belanja negara dan pengadaan bulanan

yang dilaporkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat untuk diteliti dan dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sangat baik pada tahun 2024 dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah mencapai target.

7. **Analisis Mitigasi Risiko Tahun 2024**

a. **Penerimaan pajak negara yang optimal**

Mitigasi risiko yang dilakukan terhadap penerimaan yang berasal dari *voluntary payment* yang tidak mencapai target adalah dengan melakukan pengawasan setoran pajak oleh Bendahara/BLU khususnya yang memiliki setoran besar, melakukan pengawasan realisasi penerimaan PKM secara blanan, melakukan pengawasan realisasi penerimaan PPM atas WP lainnya secara bulanan melakukan kolaborasi penanganan SP2DK dengan Kantor Wilayah. Besaran risiko awal tahun sebesar 23 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 11.

b. **Kepatuhan tahun berjalan yang Tinggi**

Mitigasi risiko yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian target atas Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu adalah dengan mengirimkan leaflet kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak baru yang melakukan pendaftaran, mengirimkan SMS/WA Blast kepada WP wajib SPT terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan, dan melaksanakan konsultasi / asistensi e-filling. Pembentukan tim satuan tugas penerimaan SPT Tahunan Dan Tim Peningkatan Kepatuhan Formal SPT Tahunan Dan Peutakhiran Data Wajib Pajak Tahun 2024 telah dibentuk untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pemantauan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Besaran risiko awal tahun sebesar 22 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 18.

Mitigasi risiko yang dilakukan terhadap realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak tercapai adalah dengan melakukan monitoring penerimaan PPM melalui MPN Info dan Mandor, monitoring penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran.

Besaran risiko awal tahun sebesar 18 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 13.

c. **Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Mitigasi risiko yang dilakukan terhadap penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak tercapai adalah dengan

melakukan pemantauan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material melalui aplikasi MPN info dan Mandor dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak.

Besaran risiko awal tahun sebesar 19 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 19.

d. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Mitigasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan, edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak.

Besaran risiko awal tahun sebesar 16 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 6.

e. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Mitigasi yang dilakukan terhadap pengawasan pembayaran masa tidak tercapai adalah dengan menerbitkan STP kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, melakukan pemantauan melalui aplikasi Mandor atas penerbitan STP, melakukan dinamisasi PPh Pasal 25, dan melakukan tindak lanjut Data Matching Data Pemicu.

Besaran risiko awal tahun sebesar 19 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 11.

f. Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

Mitigasi yang dilakukan terhadap penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) tidak mencapai target adalah dengan melakukan pemantauan melalui aplikasi Mandor dan menyelesaikan berkas pemeriksaan tepat waktu. Besaran risiko awal tahun sebesar 19 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 6.

g. Penegakan Hukum yang Efektif

Mitigasi yang dilakukan atas tidak dilaksanakannya tindakan penagihan aktif melalui pencegahan yang disebabkan oleh perlawanan dari Wajib Pajak adalah dengan melaksanakan proses pencegahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik, sehingga Seksi Penagihan dapat melakukan kegiatan pencegahan dengan

baik dan tidak terjadi perlawanan dari Wajib Pajak. Besaran risiko awal tahun sebesar 16 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 11.

Mitigasi yang dilaksanakan atas penyelesaian pemeriksaan yang tidak tepat waktu adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pengerjaan pemeriksaan secara periodik. Besaran risiko awal tahun sebesar 16 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 16.

h. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Mitigasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yaitu dengan buat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui *e-learning*, *Focus Group Discussion*, *In House Training* dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK dan memastikan capaian jamlat pegawai telah terinput.

Mitigasi yang dilakukan atas Penilaian Integritas Unit yaitu pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain adanya peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan baik dalam pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan kepada Wajib Pajak sehingga hasil survei yang didapatkan dapat maksimal.

Mitigasi yang dilakukan atas efektifitas manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah dengan melakukan pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Besaran risiko awal tahun sebesar 13 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 11.

i. Data dan Informasi yang Berkualitas

Mitigasi yang dilakukan atas data potensi perpajakan yang tidak cukup tersedia adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pembuatan Alket di Aplikasi Alket DJP. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik, dibuktikan dengan jumlah Alket SE-10 dan KPDL SE-11 yang telah diselesaikan mencapai 2.255 alket dengan target 1.040.

j. Pengelolaan Anggaran yang berkualitas

Mitigasi yang dilakukan atas temuan auditor internal/eksternal atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah dengan membuat laporan belanja negara dan pengadaan bulanan dan

dilaporkan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat untuk diteliti. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik dibuktikan dengan adanya bukti pengiriman laporan ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Besaran risiko awal tahun sebesar 13 dan besaran risiko aktual Triwulan IV Tahun 2024 adalah 8.

8. **Rencana Aksi Tahun 2025**

Untuk mencapai target kinerja tahun 2025, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua mempunyai program kerja atau rencana aksi sebagai berikut:

- a. Melakukan penerbitan STP, SP2DK, LHP2DK
- b. Membuat Laporan Capaian Kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- c. Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Tahunan
- d. Pengawasan pada aplikasi Mandor atas Kepatuhan SPT Tahunan
- e. Penerimaan SPT tahunan di KPP
- f. Kegiatan Pojok Pajak
- g. Pengawasan pembayaran masa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan menerbitkan SP2DK atas kewajiban pembayaran masa tahun berjalan yang belum disetorkan
- h. Dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 dan menerbitkan SP2DK apabila ditemukan indikasi kenaikan pembayaran PPh Pasal 25 tahun berjalan
- i. Penerbitan STP atas pembayaran masa tahun berjalan yang mengalami keterlambatan
- j. Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2025
- k. Kegiatan Pajak Bertutur
- l. Kegiatan edukasi dan Bimbingan teknis perpajakan kepada calon Wajib Pajak
- m. Penerbitan artikel perpajakan
- n. mengusulkan Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan survei efektivitas penyuluhan dan pelayanan
- o. Melakukan Imbauan kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei
- p. Monitoring penyampaian Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dari Direktorat P2Humas dan/atau Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
- q. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
- r. Penerbitan Surat Teguran
- s. Penyampaian surat paksa
- t. Pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran

- u. Pengumpulan data lapangan pada saat Visit Wajib Pajak Strategis
- v. Penginputan pada aplikasi ALKET
- w. Pelaksanaan program Assesment Center bagi pejabat eselon III dan IV
- x. Pelaksanaan Uji Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan Pejabat Fungsional
- y. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan Jabatan Pelaksana umum tahun 2025
- z. Pelaksanaan survei kepuasan Pelayanan Perpajakan baik untuk intern maupun ekstern
- aa. Pengawasan terhadap pelaksanaan DKO dan Rencana MR melalui rapat
- bb. Pengawasan terhadap revisi DIPA
- cc. Penyusunan rencana penarikan dana
- dd. Kegiatan efisiensi anggaran

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Data dari Aplikasi SAKTI periode Desember 2024, berikut adalah Laporan Ketersediaan Dana Detail TA 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Dua:

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;							
Periode Desember 2024							
Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN							
Unit Organisasi : 04 DJTJEN PAJAK							
Satuan Kerja : 635727 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA							
		Hal 1 dari 4					
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	21,833,644,000	0	20,763,087,220	862,121,025	21,615,208,245	99.00 %	218,435,795
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	828,420,000	0	759,254,762	41,889,375	801,144,137	96.71 %	27,275,863
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	222,049,000	0	210,052,400	7,810,000	217,862,400	98.11 %	4,186,600
BMA Data dan Informasi Publik	222,049,000	0	210,052,400	7,810,000	217,862,400	98.11 %	4,186,600
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	113,739,000	0	111,604,775	400,000	112,004,775	98.48 %	1,734,225
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	113,739,000	0	111,604,775	400,000	112,004,775	98.48 %	1,734,225
005.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	113,739,000	0	111,604,775	400,000	112,004,775	98.48 %	1,734,225
521211 Belanja Bahan	101,038,000	0	99,142,269	400,000	99,542,269	98.52 %	1,495,731
522151 Belanja Jasa Profesi	2,600,000	0	2,532,506	0	2,532,506	97.40 %	67,494
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,401,000	0	1,280,000	0	1,280,000	91.36 %	121,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,700,000	0	8,650,000	0	8,650,000	99.43 %	50,000
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	108,310,000	0	98,447,625	7,410,000	105,857,625	97.74 %	2,452,375
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	108,310,000	0	98,447,625	7,410,000	105,857,625	97.74 %	2,452,375
005.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	108,310,000	0	98,447,625	7,410,000	105,857,625	97.74 %	2,452,375
521211 Belanja Bahan	25,741,000	0	24,108,045	45,000	24,153,045	93.83 %	1,587,955
522151 Belanja Jasa Profesi	3,212,000	0	3,211,578	0	3,211,578	99.99 %	422
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,607,000	0	59,578,002	3,165,000	62,743,002	98.64 %	863,998
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,750,000	0	11,550,000	4,200,000	15,750,000	100.00 %	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	275,928,000	0	243,239,051	18,589,375	261,828,426	94.89 %	14,099,574
BMB Komunikasi Publik	275,928,000	0	243,239,051	18,589,375	261,828,426	94.89 %	14,099,574
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	172,125,000	0	166,113,955	2,182,000	168,295,955	97.78 %	3,829,045
100 Tidak Ada Komponen	172,125,000	0	166,113,955	2,182,000	168,295,955	97.78 %	3,829,045
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	172,125,000	0	166,113,955	2,182,000	168,295,955	97.78 %	3,829,045
521211 Belanja Bahan	38,470,000	0	35,924,565	90,000	36,014,565	93.62 %	2,455,435
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	110,400,000	0	108,280,350	2,092,000	110,372,350	99.97 %	27,650
522151 Belanja Jasa Profesi	2,600,000	0	1,700,000	0	1,700,000	65.38 %	900,000

¹Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;								
Periode Desember 2024								
Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN								
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK								
Satuan Kerja : 635727 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA								Hal 2 dari 4
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,255,000	0	15,177,040	0	15,177,040	99.49 %	77,960	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,032,000	0	5,032,000	93.19 %	368,000	
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	103,803,000	0	77,125,096	16,407,375	93,532,471	90.11 %	10,270,529	
100 Tanpa Komponen	103,803,000	0	77,125,096	16,407,375	93,532,471	90.11 %	10,270,529	
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	103,803,000	0	77,125,096	16,407,375	93,532,471	90.11 %	10,270,529	
521211 Belanja Bahan	49,315,000	0	42,089,596	360,000	42,449,596	86.08 %	6,865,404	
522151 Belanja Jasa Profesi	2,600,000	0	0	0	0	0.00 %	2,600,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,688,000	0	9,835,500	7,393,375	17,228,875	97.40 %	459,125	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,200,000	0	25,200,000	8,654,000	33,854,000	98.99 %	346,000	
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	330,443,000	0	305,963,311	15,490,000	321,453,311	97.28 %	8,989,689	
BCE Peranginan Perkara	115,523,000	0	103,744,186	9,570,000	113,314,186	98.09 %	2,208,814	
BCE.001 Dokumen Penagihan Akad	115,523,000	0	103,744,186	9,570,000	113,314,186	98.09 %	2,208,814	
100 Tidak Ada Komponen	115,523,000	0	103,744,186	9,570,000	113,314,186	98.09 %	2,208,814	
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	115,523,000	0	103,744,186	9,570,000	113,314,186	98.09 %	2,208,814	
521211 Belanja Bahan	2,350,000	0	1,711,000	420,000	2,131,000	90.68 %	219,000	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	85,000,000	0	76,900,000	8,100,000	85,000,000	100.00 %	0	
522151 Belanja Jasa Profesi	3,500,000	0	1,702,105	0	1,702,105	48.63 %	1,797,895	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,973,000	0	15,813,081	0	15,813,081	99.00 %	159,919	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,700,000	0	7,618,000	1,050,000	8,668,000	99.63 %	32,000	
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	214,920,000	0	202,219,125	5,920,000	208,139,125	96.84 %	6,780,875	
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	155,552,000	0	151,683,859	550,000	152,233,859	97.87 %	3,318,141	
100 Tidak Ada Komponen	155,552,000	0	151,683,859	550,000	152,233,859	97.87 %	3,318,141	
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	155,552,000	0	151,683,859	550,000	152,233,859	97.87 %	3,318,141	
521211 Belanja Bahan	2,920,000	0	1,413,000	0	1,413,000	48.39 %	1,507,000	
522151 Belanja Jasa Profesi	2,600,000	0	842,105	0	842,105	32.39 %	1,757,895	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141,332,000	0	141,302,754	0	141,302,754	99.98 %	29,246	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,700,000	0	8,126,000	550,000	8,676,000	99.72 %	24,000	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;								
Periode Desember 2024								
Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN								
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK								
Satuan Kerja : 635727 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA								Hal 3 dari 4
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	54,948,000	0	48,928,766	4,170,000	53,098,766	96.63 %	1,849,234	
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	54,948,000	0	48,928,766	4,170,000	53,098,766	96.63 %	1,849,234	
005.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	54,948,000	0	48,928,766	4,170,000	53,098,766	96.63 %	1,849,234	
521211 Belanja Bahan	2,800,000	0	2,692,500	0	2,692,500	96.16 %	107,500	
522151 Belanja Jasa Profesi	2,116,000	0	842,105	0	842,105	39.80 %	1,273,895	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,782,000	0	40,144,161	4,170,000	44,314,161	96.96 %	467,839	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00 %	0	
BIG.005 Laporan Penilaian	4,420,000	0	1,606,500	1,200,000	2,806,500	63.50 %	1,613,500	
100 Tidak Ada Komponen	4,420,000	0	1,606,500	1,200,000	2,806,500	63.50 %	1,613,500	
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	4,420,000	0	1,606,500	1,200,000	2,806,500	63.50 %	1,613,500	
521211 Belanja Bahan	2,010,000	0	780,000	600,000	1,380,000	68.66 %	630,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,510,000	0	658,500	0	658,500	43.61 %	851,500	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	168,000	600,000	768,000	85.33 %	132,000	
WA Program Dukungan Manajemen	21,005,224,000	0	19,993,832,458	820,231,650	20,814,064,108	99.09 %	191,159,892	
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	20,144,120,000	0	19,325,446,458	698,076,650	20,023,523,108	99.40 %	120,596,892	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,101,089,000	0	19,282,415,458	698,076,650	19,980,492,108	99.40 %	120,596,892	
EBA.001 Kerumahtanggaan	80,561,000	0	78,095,636	454,765	78,550,401	97.50 %	2,010,599	
100 Tidak Ada Komponen	80,561,000	0	78,095,636	454,765	78,550,401	97.50 %	2,010,599	
100.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	80,561,000	0	78,095,636	454,765	78,550,401	97.50 %	2,010,599	
521211 Belanja Bahan	8,110,000	0	7,928,340	0	7,928,340	97.76 %	181,660	
522151 Belanja Jasa Profesi	800,000	0	400,000	0	400,000	50.00 %	400,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,988,000	0	52,356,296	454,765	52,811,061	97.82 %	1,176,939	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,663,000	0	17,411,000	0	17,411,000	98.57 %	252,000	
EBA.994 Layanan Perkantoran	20,020,528,000	0	19,204,319,822	697,621,885	19,901,941,707	99.41 %	118,586,293	
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	20,020,528,000	0	19,204,319,822	697,621,885	19,901,941,707	99.41 %	118,586,293	
002.0A KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	20,020,528,000	0	19,204,319,822	697,621,885	19,901,941,707	99.41 %	118,586,293	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;								
Periode Desember 2024								
Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN								
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK								
Satuan Kerja : 635727 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA								
Hal 4 dari 4								
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	9,714,600,000	0	9,662,951,634	34,925,922	9,697,877,556	99.83 %	16,722,444	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	147,600,000	0	133,384,952	6,137,478	139,522,430	94.53 %	8,077,570	
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,776,000	0	58,980,000	11,796,000	70,776,000	100.00 %	0	
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	70,748,000	0	39,659,229	24,051,513	63,710,742	90.06 %	7,035,258	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	247,848,000	0	225,240,058	13,956,030	239,196,088	96.51 %	8,651,912	
522111 Belanja Langganan Listrik	4,906,404,000	0	4,498,604,374	407,798,194	4,906,402,568	100.00 %	1,432	
522112 Belanja Langganan Telepon	162,276,000	0	148,893,937	13,373,263	162,267,200	99.99 %	8,800	
522113 Belanja Langganan Air	184,680,000	0	169,482,975	15,193,725	184,676,700	100.00 %	3,300	
522141 Belanja Sewa	340,856,000	0	325,174,500	13,486,500	338,661,000	99.36 %	2,195,000	
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,653,385,000	0	2,499,740,787	100,652,025	2,600,392,792	98.00 %	52,992,208	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,520,857,000	0	1,442,207,396	56,251,235	1,498,458,631	98.53 %	22,398,369	
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000	
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	43,031,000	0	43,031,000	0	43,031,000	100.00 %	0	
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	43,031,000	0	43,031,000	0	43,031,000	100.00 %	0	
100 Tidak Ada Komponen	43,031,000	0	43,031,000	0	43,031,000	100.00 %	0	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	43,031,000	0	43,031,000	0	43,031,000	100.00 %	0	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43,031,000	0	43,031,000	0	43,031,000	100.00 %	0	
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	861,104,000	0	668,386,000	122,155,000	790,541,000	91.81 %	70,563,000	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	861,104,000	0	668,386,000	122,155,000	790,541,000	91.81 %	70,563,000	
EBA.994 Layanan Perkantoran	861,104,000	0	668,386,000	122,155,000	790,541,000	91.81 %	70,563,000	
001 Gaji dan Tunjangan	861,104,000	0	668,386,000	122,155,000	790,541,000	91.81 %	70,563,000	
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	861,104,000	0	668,386,000	122,155,000	790,541,000	91.81 %	70,563,000	
511129 Belanja Uang Makan PNS	766,130,000	0	603,326,000	120,898,000	724,224,000	94.53 %	41,906,000	
512211 Belanja Uang Lembur	94,974,000	0	65,060,000	1,257,000	66,317,000	69.83 %	28,657,000	
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.								

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Dua merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Dengan banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024, seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan berpegang teguh pada visi dan misi yang telah dicanangkan serta dengan mentaati kode etik pegawai, berusaha sekuat tenaga mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Menteng Dua tahun 2024 adalah sebesar 109,96%. Capaian kinerja pada tahun ini mengalami tren positif dibandingkan dengan nilai Capaian Kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 100,60%.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi aparat pajak yang profesional terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kondisi perekonomian yang kurang stabil.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Menteng Dua



Ditandatangani secara elektronik
Sevta Winanda

